BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dalam era globalisasi saat ini, semakin mendorong peningkatan fungsi perbankan. Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan, perbankan memegang peranan yang sangat penting didalam sistem keuangan negara. Bank merupakan badan usaha yang memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat atau bisa disebut sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*). Menurut Kasmir (2002:12) menyatakan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut pada masyarakat dan memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, memiliki banyak permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia khususnya permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pembangunan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah kecilnya modal yang dimiliki.

Modal (*capital*) adalah sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Indonesia mengalami krisis moneter dan krisis ekonomi yang terjadi sekitar Mei tahun 1997, berlanjut menjadi krisis multidimensi yang berdampak pada lemahnya perekonomian Indonesia dan masih harus menghadapi permasalahan yang mungkin juga dialami negara lain, khususnya Negara yang sedang berkembang, yang sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan tersebut tentunya memerlukan dana dalam jumlah

yang sangat besar. Salah satu sumber pendanaan tersebut adalah kredit bank. Oleh karena itu system perkreditan yang merupakan jasa perbankan menjadi salah satu pilihan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Adapun beberapa jasa yang diberikan oleh perbankan adalah memberikan fasilitas kredit seperti kredit program pemerintah, kredit investasi, kredit konsumtif , kredit ekspor dan kredit modal kerja.

Pembangunan ekonomi suatu di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata sektor perbankan. Ketika sektor perbankan terpuruk perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian pula sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal. (Kiryanto, 2007:22).

Peran penting perbankan sebagai salah satu fungsi intermediasi dalam fasilitas pemberian kredit dalam pembangunan ekonomi namun di sisi lain pemberian kredit perbankan yang dibiayai oleh bank sentral, baik dalam bentuk kredit likuidita maupun kredit langsung, akan menambah jumlah uang primer (*resever money*) dan memberikan dampak inflatoir. Berkaitan dengan hal itu, pemberian kredit yang sepenuhnya dibiayai dana masyarakat yang dihimpun melalui perbankan dan dipergunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif akan mendorong perekonomian tanpa menimbulkan dampak inflatoir. Untuk mengatasi dampak inflatoir dan pemberian kredit perbankan, sedapat mungkin kredit perbankan dibiayai dari pengerahan dana masyarakat (Bank Indonesia, 2007:11)

Studi – studi mengenai hubungan antar peran intermediasi dengan pertumbuhan ekonomi dipelopori oleh Goldsmith (1969:39); Mckinnon (1973:23)

dan Shaw (1973:11). Mereka menemukan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh struktur keuangan yang terorganisir. Mereka percaya bahwa pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus fund*) akan sangat membantu pihak-pihak yang kekurangan dana (*deficit fund*) apabila dapat dikelola secara efisien. Dalam pandangan mereka perbedaan kualitas dan kuantitas pelayanan yang di berikan oleh lembaga keuangan adalah strategi yang optimal untuk meningkatkan pertumbuhan *output* lebih cepat lagi dengan cara merangsang keinginan untuk menabung dan meningkatkan kualitas formasi modal (Ghafar, et al: 2003:34)

Meskipun penyaluran kredit memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun kredit yang disalurkan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari LDR (*Loan to Deposit Ratio*) bank umum periode 2005-2014 yang masih berkisar pada angka 59,66%-79,58% (Statistik Perbankan Indonesia), masih berda di bawah harapan dari Bank Indonesia. Menurut ketentuan Bank Indonesia angka LDR seharusnya berada disekitar 85%-110% (Manurung,2004:19).

Reformasi sector keuangan yang bertujuan untuk menggerakkan sector rill melalui kredit modal kerja atau kredit investasi bagi usaha produk tif yang *feasible* namun belum *bankable*. Selain itu Bank Indonesia berniat mengubah lagi aturan Giro Wajib Minimum (GWM). Perubahan ini memiliki salah satu tujuan, yaitu untuk mendorong penyaluran kredit perbankan. Dalam aturan yang berlaku besarnya GWM untuk tiap bank sesuai dengan rasio penyaluran kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (*Loan to Deposite Ratio*) bank (Kontan,2010:1)

Selain itu Dana Pihak Ketiga, terkadang diperlukan oleh para pengusaha untuk dipergunakan dalam aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit perbankan. Menurut Warjiyo (2004:9) mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang implicit beranggapan bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar dipergunakan untuk penanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit perbankan. Dalam kenyataannya anggapan seperti itu tidak selamanya benar. Selain dana yang tersedia perilaku penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPL) dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*).

Menurut Retnadi (2006:12) kemampuan menyalurkan kredit oleh perbankan dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat dan penetapan suku bunga. Dan dari sisi eksternal bank dipengaruhi oleh beberapa factor seperti kondisi ekonomi dan peraturan pemerintah.

Jumlah kredit pada bank pemerintah Propinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang terus meningkat, Jumlah kredit bank pemerintah di provinsi Sumatera Utara meningkat dari Rp 130.133.17 milyar pada tahun 2005 menjadi Rp 277.091.82 milyar pada tahun 2014. Jumlah kredit yang disalurkan bank di propinsi Sumatera Utara di dominasi oleh bank-bank pemerintah. Bank-bank pemerintah dalam kategori kepemilikan usaha yaitu BUMN terdiri dari Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank

Tabungan Negara (BTN) dan BUMD terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kredit disalurkan oleh Bank Pemerintah di propinsi Sumatera Utara rata-rata hanya 16.89%, hal ini belum seperti yang diharapkan karena peraturan Bank Indonesia, angka LDR seharusnya berada di sekitar 85%-110% (Manurung, 2004:19). Secara lebih rinci tren jumlah kredit tersebut dapat dilihat dari tabel 1.1.

Dari tabel 1.1 dapat ditemukan bahwa jumlah kredit pada suatu bank dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi debitur perbankan itu sendiri. Jumlah kredit dari sisi debitur (dunia usaha) dipengaruhi oleh adanya peningkatan aktivitas usaha, baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.

Tabel 1.1. Jumlah Kredit Tahun 2010-2014 pada Bank Pemerinta di Propinsi Sumatera Utara

No	Tahun	Jumlah Kredit (Milyar Rupiah)	Perubahan (%)
1	2010	130133.17	-
2	2011	155880.83	16.52
3	2012	188043.49	17.10
4	2013	230545.12	18.44
5	2014	277091.82	16.80

Sumber : Bank Indonesia Medan, 2015

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004:35), salah satu alasan permintaan kredit adalah transaksi, yaitu kebutuhan alat tukar yang diterima oleh umum untuk membeli barang dan membayar tagihan, dan sebagai tambahannya, yaitu sebagai asset atau penyimpan nilai. Permintaan kredit tersebut dipengaruhi oleh suku bunga (biaya untuk memegang uang), dimana semakintinggi biaya (suku bunga kredit) maka permintaan kredit (uang) menurun.

Perkembangan tingkat suku bunga kredit pada bank Pemerintah di Propinsi Sumatera Utara :

Tabel 1.2. Perkembangan Tingkat Bunga Kredit Bank Pemerintah tahun 2010-2014

No	Tahun	Tingkat Suku Bunga Kredit (%)
1	2010	12.71
2	2011	12.76
3	2012	11.83
4	2013	13.43
5	2014	12.37

Sumber : Bank Indonesia, 2015

Tabel 1.2. diatas dapat diketahui bahwa perkembangan tingkat suku bunga kredit di propinsi Sumatera Utara terus berubah dan fluktuatif pada periode 2010-2014 dengan tren yang menurun kecuali tahun 2013 suku bunga kredit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Manurung dan Manurung (2009:33), mengungkapkan model keseimbangan bank Indonesia didasarkan pada perilaku kredit dan deposit perbankan. Salah satu model kredit perbankan ditentukan oleh produ domestic regional bruto dengan ekspektasi teori.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat wilayah atau daerah didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB propinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014, sebagai berikut :

Tabel 1.3. PDRB Propinsi Sumatera Utara atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2014

No	Tahun	PDRB (Milyar Rupiah)	Perubahan (%)
1	2010	113653.77	-
2	2011	138799.13	18.12
3	2012	157945.17	12.12
4	2013	181857.72	13.15
5	2014	209567.38	13.22

Sumber : Bank Indonesia Medan, 2015

Tabel 1.3. diatas dapat diketahui bahwa PDRB Propinsi Sumatera Utara berdasarkan harga konstan menunjukkan tren yang terus meningkat. PDRB Sumatera Utara meningkatkan dari Rp 113.653.77 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp 209.567.38 milyar pada tahun 2014.

Fisher (1989:43), mengemukakan secara makro ekonomi tingkat inflasi berpengaruh terhadap simpanan. Dengan adanya inflasi maka diasumsikan suku bunga dengan inflasi. Dengan suku bunga rill yang diperkirakan konstan dalam jangka panjang dan ekspektasi infla yang menyesuaikan diri terhadap laju inflasi yang berlaku.

Tabel 1.4. Tingkat inflasi di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014

No	Tahun	Inflasi (%)
1	2010	22.41
2	2011	6.11
3	2012	6.60
4	2013	10.72
5	2014	2.61

Sumber : Bank Indonesia Medan, 2015

Tabel 1.4. diatas dapat diketahui bahwa tingkat inflasi di Propinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang terus menurun. Tingkat inflasi di Sumatera Utara menurun dari 22.41% pada tahun 2010 menjadi 2.61% pada tahun 2014.

Ascarya (2002:28), dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, pemerintah bekerja sama dengan otoritas moneter mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter dalam hal ini adalah Bank Indonesia, dengan menggunakan instrument Giro Wajib Minimum (GMW). Cadangan Primer atau yang umum dikenal dengan giro wajib minimum adalah instrument tidak langsung merupakan ketentuan dari Bank Sentral yang mewajibkan bank-bank memelihara sejumlah alat likuid presentasi tertentu dari kewajiban lancarnya.

Tabel 1.5. Jumlah Giro Wajib Minimum Perbankan di propinsi Sumatera Utara 2010-2014

No	Tahun	Jumlah GWM (Milyar Rupiah)	Perubahan (%)
1	2010	93804	-
2	2011	117924	20.45
3	2012	158452	25.58
4	2013	78405	(102.09)
5	2014	96246	18.54

Sumber : Bank Indonesia Medan, 2015

Tabel 1.5. diatas dapat diketahui bahwa Giro Wajib Minimum di Propinsi Sumatera Utara menunjukkan tren menurun dan meningkat. Giro Wajib Minimum di Propinsi Sumatera Utara meningkat dari Rp 93.804 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp 96.246 milyar pada tahun 2014

Kotler (2000:31) menyatakan kualitas layanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat layanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat layanan yang diterima (*perceived service*) dengan tingkat layanan yang diharapkan (*expected service*). Jumlah kantor cabang juga menjadi pertimbangan sendiri bagi masyarakat yang ingin menyimpan dan

meminjam dananya di bank. Apalagi mobilitas masyarakat yang semakin cepat dan terus berkembang, mereka jasa financial yang mudah dan praktis.

Tabel 1.6. Jumlah Kantor Bank Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah Kantor Bank	Naik/Turun %
1	2010	532	-
2	2011	624	14.74
3	2012	638	2.19
4	2013	660	3.33
5	2014	741	10.93

Sumber : Bank Indonesia Medan, 2015

Tabel 1.6. diatas dapat diketahui bahwa jumlah kantor Bank Pemerintah di Propinsi Sumatera Utara menunjuk tren yang terus meningkat. Jumlah kantor Bank Pemerintah meningkat dari 532 unit kantor pada tahun 2010 menjadi 741 unit kantor pada tahun 2014.

Kredit mempunyai peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian, peran dan fungsi kredit secara garis besar di dalam perekonomian, keuangan dan perdagangan sebagai berikut : (1) kredit dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal / uang, (2) kredit dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari suatu barang, (3) kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, (4) kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat, (5) kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi, (6) kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, (7) kredit sebagai hubungan ekonomi internasional (Rivai dan Veithzal2006:17).

Sehubungan dengan pentingnya peranan kredit perbankan dalam perekonomian sebagai intermediasi dan transformasi asset serta terkait dengan perkembangan variable makro ekonomi, maka perlu dilakukan suatu pengkajian

ilmiah tentang kredit perbankan, khususnya pada Bank Pemerintah di Sumatera Utara.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian ini adalah : apakah variable-variabel makro ekonomi seperti Tingkat Suku bunga (TSB), Pendapatan Domestic Regional Bruto(PDRB), inflasi (INF), Giro Wajib Minimum (GWM), dan Jumlah Kantor Bank (JKB) berpengaruh terhadap kredit pada Bank Pemerintah di Sumater Utara.

1.3. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran kredit pada Bank Pemerintah di Sumatera Utara sebagai investor secara terperinci. Perumusan masalah dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana pengaruh variable-variabel makro ekonomi seperti Tingkat Suku Bunga (TSB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi (INF), Giro Wajib Minimum (GWM) dan Jumlah Kantor Bank (JKB) terhadap penawaran kredit pada bank pemerintah di Sumatera Utara dan variable makro ekonomi mana yang paling dominan berpengaruh terhadap jumlah kredit pada bank Pemerintah di Bank Sumatera Utara?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

- Mengetahui dan menganalisis pengaruh variable makro ekonomi seperti Tingkat Suku Bunga (TSB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi (INF), Giro Wajib Minimum (GWM), dan Jumlah Kantor Bank (JKB) terhadap penawaran kredit perbankan pada Bank pemerintah di Sumatera Utara dan mengetahui variabel makro ekonomi yang paling dominan pengaruhnya terhadap jumlah kredit pada bank Pemerintah di Sumatera Utara.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi manajemen bank-bank pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk merealisasikan kredit perbankan.
2. Sebagai informasi ilmiah dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang makro dan mikro ekonomi serta kaitan dengan kredit perbankan.
3. Sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat mengkaji bidang yang relevan dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.